

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada tanggal 16 Agustus 2019, sekelompok mahasiswa Papua yang menetap di Asrama Mahasiswa Papua (AMP), tepatnya di Jl. Kalasan No. 10, Surabaya, Jawa Timur, dituduh melakukan perusakan pada bendera Indonesia. Mahasiswa tersebut dituduh telah merusak tiang bendera dan membuangnya ke selokan dekat AMP. Tuduhan perusakan bendera pusaka tersebut pertama kali disebut oleh Tri Susanti di dalam grup obrolan media sosial whatsapp bernama “INFO KB FKPPPI”. FKPPPI atau yang merupakan singkatan dari Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri ini memiliki fungsi sebagai penegak NKRI dan mencegah masyarakat dari paham radikalisme yang membahayakan kedaulatan NKRI. Tri Susanti yang telah melanggar peraturan Negara harus dikeluarkan dan ditetapkan sebagai tersangka dengan jeratan pasal berlapis seperti pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang (UU) mengenai diskriminasi ras dan etnis (dilansir dari suara.com¹, diakses pada 09/05/2020).

Dilansir dari cnnindonesia.com², tuduhan yang dilakukan Tri Susanti mengundang amarah warga dan ormas setempat terhadap mahasiswa AMP, karena mengetahui berita bohong yang disebar oleh Tri Susanti. Kemudian terjadi peristiwa adu mulut antara ormas dengan penghuni AMP. Permasalahan tuduh menuduh ini semakin keruh dan akhirnya terjadilah aksi pengepungan yang dilakukan oleh aparat keamanan dan ormas. Pengepungan ini tidaklah hanya sekedar pengepungan. Pengepungan disertai dengan penyerangan meliputi intimidasi rasis, perusakan pagar asrama serta pelemparan gas air mata oleh Brimob ke dalam AMP. Penyebab penyerangan ini dikarenakan kurangnya kerjasama mahasiswa Papua terhadap aparat keamanan. Aparat keamanan menginginkan keterangan dari mahasiswa Papua di AMP mengenai

¹ Yulita Futy, “Bukti-bukti Tri Susanti Sebar Foto Hoaks Bendera Merah Putih di Comberan”, <https://www.suara.com/video/2019/08/29/205555/bukti-bukti-tri-susanti-sebar-foto-hoaks-bendera-merah-putih-di-comberan> (diakses pada 10 Mei 2020, pukul 13.20).

² Arla Ananda, “Kronologi Pengepungan Asrama Papua Surabaya Versi Mahasiswa”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190819072043-20-422556/kronologi-pengepungan-asrama-papua-surabaya-versi-mahasiswa> (diakses pada 11 Desember 2019, pukul 12.13).

dugaan perusakan bendera Indonesia namun mahasiswa-mahasiswa tersebut tidak kooperatif. Mahasiswa pun tidak kooperatif karena mereka merasa tidak bersalah, apalagi aparat keamanan ingin memintai keterangan tanpa adanya bukti-bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 2019, aparat keamanan masuk secara paksa ke dalam AMP dan menangkap 43 (40 laki-laki dan 3 perempuan) mahasiswa Papua AMP untuk dimintai keterangannya mengenai perusakan bendera Indonesia di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya (Polrestabes Surabaya).



Gambar 1. 1 Unjuk Rasa Mahasiswa Papua di Istana Merdeka

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190829230350-20-425955/mengapa-bintang-kejora-bisa-berkibar-di-seberang-istana>

Menanggapi hal tersebut, pada tanggal 28 Agustus 2019 sekitar ratusan mahasiswa Papua dari Aliansi Mahasiswa Papua dan Papua Barat yang juga mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme melakukan unjuk rasa di seberang Istana Merdeka, Ibukota Jakarta (dilansir dari riaupos.com³, diakses pada 15/05/2020). Dalam unjuk rasa, mereka menuntut pemerintah untuk menangkap pelaku yang telah melakukan provokasi dengan menyebut kata-kata rasis terhadap mahasiswa Papua di AMP. Karena tuntutan tersebut, mereka juga menyebutkan tuntutan lain yang berlawanan dengan peraturan Indonesia

³ Edwir. "Sudah 8 Orang Ditetapkan Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora", <https://riaupos.jawapos.com/hukum/01/09/2019/207631/sudah-8-orang-ditetapkan-tersangka-pengibar-bendera-bintang-kejora-.html> (diakses pada 15 Mei 2020, pukul 15.23).

yaitu meminta referendum terhadap Papua. Tuntutan pemberian referendum terhadap Papua semakin terlihat agresif ketika bendera Bintang Kejora dikibarkan di depan Istana Merdeka. Di sela-sela tuntutanannya, mereka juga menyanyikan lagu gerakan papua merdeka dengan memakai atribut bermotif Bintang Kejora (dilansir dari [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com)⁴, diakses pada 11/12/2019).

Sebelumnya para mahasiswa Papua tersebut tidak diizinkan oleh aparat untuk melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka, namun pada akhirnya mereka dapat melakukannya. Bahkan mereka diizinkan untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora. Aparat yang seharusnya memberhentikan aksi tersebut lebih memilih untuk terdiam. Namun, pada 29 Agustus 2019 aparat langsung memberikan pengumuman bahwa pelaku pengibar bendera Bintang Kejora akan diberikan sanksi tegas. Sikap membiarkan ini bertujuan untuk mengendalikan massa agar situasi unjuk rasa tidak semakin memanas. Wasisto Raharjo seorang pengamat politik LIPI mengatakan bahwa Pemerintah sangat berhati-hati dalam menyikapi permasalahan Papua. Belajar dari kasus tahun 2002 saat terjadinya kemerdekaan Timor Leste, Pemerintah saat ini lebih memilih untuk melakukan pendekatan yang lebih lembut terhadap permasalahan Papua. Unjuk rasa di depan Istana Merdeka ini mendapat banyak sorotan dari berbagai media massa karena unsur bendera Bintang Kejora yang dimaknai sebagai simbol separatisme Papua (dilansir dari [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com)⁵, diakses pada 15/05/2020).

Unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2019 oleh mahasiswa Papua ini merupakan hal yang tidak biasa. Jika dibandingkan dengan Hari Deklarasi Papua Barat yang diselenggarakan pada setiap tanggal 1 Desember, massa unjuk rasa Hari Deklarasi Papua Barat tidak pernah mengibarkan bendera Bintang Kejora di Ibukota Jakarta. Menurut pemberitaan yang saya lihat sejak 2014 hingga 2018 di [kompas.com](https://www.kompas.com) dan [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com), unjuk rasa ini memang terlihat menggunakan beberapa atribut Bintang Kejora, namun tidak sampai mengibarkan bendera Bintang Kejora dan tidak pernah melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka yang merupakan sentral pemerintahan (hasil observasi penulis tentang pemberitaan Hari Deklarasi Papua Barat

⁴ Joko Panji Sasongko. "Bendera Bintang Kejora Dikibarkan di Seberang Istana", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190828152313-20-425404/bendera-bintang-kejora-dikibarkan-di-seberang-istana> (diakses pada 11 Desember 2019, pukul 12.46).

⁵ Joko Panji Sasongko. "Mengapa Bintang Kejora Bisa Berkibar di Seberang Istana?", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190829230350-20-425955/mengapa-bintang-kejora-bisa-berkibar-di-seberang-istana> (diakses pada 15 Mei 2020, pukul 15.03).

pada periode tanggal 1 Desember di tahun 2014-2018 pada kompas.com dan cnnindonesia.com⁶).



Gambar 1. 2 Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Istana Merdeka

Sumber: <https://tirto.id/mahasiswa-papua-tuntut-referendum-ehb5>

Dilansir dari cnnindonesia.com⁷, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisariss Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan bahwa, tersangka pengibar bendera Bintang Kejora di depan Istana Merdeka ini mendapatkan jeratan Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 106 dan 110. Pasal 106 membahas tentang makar yang merupakan kegiatan penyerangan terhadap keutuhan wilayah Negara seperti keinginan memisahkan diri dari Negara induknya. Kemudian pasal 110 membahas tentang pemufakatan kejahatan seperti penggerakan orang lain untuk melakukan kejahatan, hal ini berkaitan dengan pengibaran bendera Bintang Kejora. Tuntutan-tuntutan yang diinginkan oleh massa juga termasuk dalam pasal makar yaitu meminta referendum kepada Papua dan Papua Barat.

Adriana Elisabeth, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan dalam acara Metro Pagi Time⁸ mengatakan setidaknya terdapat empat

⁶ Lampiran 1. Pemberitaan Unjuk Rasa Hari Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat

⁷ Andry Novellino, “Kasus Bendera Bintang Kejora, Surya Anta Dijerat Pasal Makar”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190901111111-12-426516/kasus-bendera-bintang-kejora-surya-anta-dijerat-pasal-makar> (diakses pada 18 Mei 2020, pukul 14.00).

⁸ Metro Pagi Time, “LIPI: Ada 4 Akar Permasalahan di Papua”, <https://www.youtube.com/watch?v=N8yr12q0d78> (diakses pada 01 Juni 2020, pukul 15:34)

permasalahan Papua yang membuat masyarakat Papua terus mengalami bentrok dengan NKRI. Pertama, marjinalisasi dan diskriminasi rasial seperti yang terjadi di Surabaya pada 16 Agustus 2019. Kedua, permasalahan pembangunan Papua terutama di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi lokal (mengacu pada UUD Otonomi Khusus). Ketiga, siklus kekerasan yang mengarah kepada pelanggaran HAM. Keempat, pro kontra sejarah Papua pada tahun 1969, Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera – *Act of Free Choice*).

Pepera diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menentukan masuk atau tidaknya Papua ke dalam Indonesia. Penyelenggaraan ini dilatar belakangi perdebatan antara Indonesia dan Belanda mengenai nasib Papua. Satu sisi, Indonesia ingin mengklaim Papua karena Papua merupakan bekas jajahan Hindia Belanda, sedangkan Belanda berpendapat bahwa Papua memiliki keadaan sosial, budaya dan geografis yang berbeda dengan Indonesia maka Papua harus menentukan nasibnya sendiri. Sebelum Pepera digelar, militer Indonesia melakukan penekanan terhadap para pimpinan Papua. Penekanan ini berupa penangkapan, pemenjaraan dan pengasingan. Hal ini memberikan dampak terhadap masyarakat Papua. Pada akhirnya, pemerintah hanya menunjuk sekitar 1.000 – 1.026 rakyat Papua sebagai perwakilan untuk mengikuti Pepera, padahal seharusnya Pepera diikuti oleh seluruh rakyat Papua yang saat itu berjumlah sekitar 800.000 orang. Dengan situasi tersebut, hasil akhir pemungutan suara menunjukkan bahwa masyarakat Papua seluruhnya setuju menjadi bagian dari Indonesia. Akhirnya Papua menjadi provinsi ke 26 negara Indonesia. Semenjak peristiwa tidak adil tersebut, berbagai aksi perlawanan mulai bermunculan, beberapa di antaranya adalah aksi separatisme dan pengibaran bendera Bintang Kejora. Pada tahun 1965, gerakan separatisme semakin menguat dengan munculnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan gerakan tersebut (Elsham, 2012:6-7).

Kemudian persoalan mengenai jumlah Orang Asli Papua (OAP) dengan orang bukan Papua. Menurut Jim Elmslie dalam jurnalnya yang berjudul *The Great Divide: West Papuan Demographics Revisited; Settlers Dominate Coastal Regions but the Highlands Still Overwhelmingly Papuan* (2017:2-3), orang bukan Papua memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan OAP. Elmslie dalam jurnalnya mencantumkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai statistik jumlah OAP dan orang bukan Papua (2017), beberapa wilayah di antaranya Kota Jayapura, memiliki

perbandingan presentasi yang tipis yaitu 51,49% OAP dan 50,49% orang bukan Papua. Hal ini dikarenakan kualitas hidup yang berada di bawah rata-rata, kemudian tingginya angka kematian ibu dan anak yang memengaruhi tingkat kesuburan di Papua dan besarnya jumlah migrasi dari daerah lain Indonesia ke Papua. Elmslie (2017:9) menyimpulkan bahwa beberapa masyarakat Papua yang tinggal di kabupaten Sorong, Merauke, Kota Jayapura, Keerom dan Mimika telah menjadi minoritas dan akan terus terpinggirkan karena banyaknya imigran non-Papua untuk bekerja di berbagai peluang ekonomi. Dengan semakin bertambahnya imigran non-Papua, OAP akan semakin kehilangan tanah tradisionalnya, kemudian diskriminasi dalam pekerjaan, layanan kesehatan dan pendidikan, lalu ketegangan agama dan meningkatnya penindasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer, terutama terhadap aktivitas separatisme oleh OPM yang aktif berada di Papua.

Unjuk rasa mahasiswa Papua di depan Istana Merdeka ini dapat dikatakan sebagai sebuah kemajuan bagi OPM, karena dalam rangka mencapai tujuan referendum tersebut, OPM berusaha untuk tetap berada di permukaan dengan cara melakukan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora, propaganda, penculikan, penyergapan, penyebaran dan demonstrasi atau rapat umum di daerah-daerah kecil (Al-Rahab, 2006:9). Dengan adanya permasalahan Papua ini, seakan-akan OPM memanfaatkan peristiwa ini untuk memperlihatkan kembali kepada Indonesia dan negara asing tentang bagaimana selama ini Papua tertindas. Fakta mengenai isu referendum warga Papua ini merupakan hal yang sensitif karena semakin isu referendum diberitakan, maka keinginan warga Papua untuk merdeka akan semakin terdukung. Separatisme Papua ini menjadi ancaman utama Indonesia. Unjuk rasa seperti ini tidak bisa dibiarkan terjadi lagi karena sudah melanggar peraturan negara Indonesia. Jika terjadi lagi kedepannya, hal ini akan menekan pemerintah dan unjuk rasa tersebut akan semakin mengundang perhatian negara asing mengenai situasi permasalahan Papua (Nainggolan, 2016:184).

Terdapat beberapa alasan utama mengapa kepergian Papua dari Indonesia akan memberikan dampak besar kepada Indonesia. *Pertama*, dari sisi pertambangan Papua memiliki beberapa perusahaan besar yang merupakan perusahaan vital Indonesia. Salah satunya adalah PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang telah berdiri sejak 1967 sebelum Pepera digelar. Pertambangan yang berlokasi di dataran tinggi Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua ini menambang biji-bijian yang mengandung

tembaga emas dan perak. PTFI yang sudah sejak lama berada di tangan negara asing ini, pada tahun Februari 2017 akhirnya Indonesia berhasil divestasi saham PTFI sebesar 51 persen dari yang sebelumnya hanya 9,36 persen. Hal ini akan memberikan perbaikan terhadap pendapatan Negara serta penguasaan kekayaan alam Papua (Yoesry, 2019:157).



Gambar 1. 3 Sejarah Penguasaan Tanah di Papua Barat

Sumber: <https://jubi.co.id/infografis-sejarah-penguasaan-tanah-orang-asli-papua/>

Dilansir dari kontan.co.id⁹, semenjak PTFI merubah statusnya dari Kontak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), kontribusi PTFI untuk Indonesia naik 10 persen menjadi 25 persen (sebelumnya 15 persen). Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin saat menjelaskan perubahan pendapatan Negara pasca perubahan status PTFI. Mengutip dari kompas.com¹⁰, Richard Adkerson, Presiden Direktur dari Freeport McMoran juga mengatakan bahwa dengan perubahan tersebut, Indonesia akan mendapatkan pemasukan lebih dari 60 miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar 884 triliun (kurs Rp 14.745 per dollar Amerika Serikat 22/05/2020). Lalu, terdapat juga perusahaan gas

⁹ Ridwan Nanda Mulyana, "Begini pogram smelter dan skema kenaikan penerimaan negara dari Freeport Indonesia", <https://industri.kontan.co.id/news/begini-pogram-smelter-dan-skema-kenaikan-penerimaan-negara-dari-freeport-indonesia> (diakses pada 21 Mei 2020, Pukul 23:46).

¹⁰ Andri Donnal Putera, "Genggam 51 Persen Saham Freeport, Berapa Potensi Pendapatan Indonesia?", <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/13/150400726/genggam-51-persen-saham-freeport-berapa-potensi-pendapatan-indonesia-> (diakses pada 22 Mei 2020, pukul 00:05).

yang menyumbang *lifting* gas terbesar, British Petroleum (BP). BP telah berdiri di Papua Barat sejak 1997 melakukan penambangan minyak dan gas. Pada tahun 2019, BP menjadi penyumbang *lifting* gas nasional terbesar yaitu sebesar 971 juta kaki kubik per hari (dilansir dari katadata.co.id¹¹, diakses pada 22/05/2020).

Kedua, Indonesia akan kehilangan pulau terluasnya yaitu seluas 808.105 KM² dan *Ketiga*, Indonesia akan kehilangan kekayaan alamnya yang berharga. Kekayaan alam yang dimiliki Papua merupakan sumber daya energi berbentuk fosil seperti minyak bumi, gas bumi dan batubara yang melimpah. Tak hanya itu, jenis energi non-fosil seperti panas bumi, air, sinar matahari, angin dan bio-energi juga tersebar di tanah Papua. Tanah Papua sudah sebaiknya dijaga karena banyak sekali sumber pendapatan Indonesia dari provinsi tersebut (Enembe, 2016:182-183).

Berbagai permasalahan di atas seperti ketidakadilan dalam persoalan Sumber Daya Alam (SDA), sosial dan budaya, kemudian tingkat keamanan masyarakat Papua (keberadaan militer di Papua yang dinilai mengintimidasi masyarakat Papua), lalu keterbelakangan yang terus terjadi dan perbedaan paham mengenai sejarah penggabungan Papua ke dalam Indonesia, pada akhirnya hal-hal tersebut membuat masyarakat Papua merasa terjajah dan meminta kepada pemerintah untuk memberikan referendum terhadap Papua. Hal tersebut dijadikan harapan bagi mereka agar mereka terlepas dari semua tindakan pelanggaran HAM tersebut yang telah menodai harkat martabat masyarakat Papua (Sugandi, 2008:3).

Atas dasar latar belakang di atas, saya tertarik untuk meneliti unjuk rasa mahasiswa Papua di depan Istana Merdeka. Dari sisi media, berita ini merupakan berita yang sangat sensitif untuk dibahas karena ketika jurnalis memberitakan permasalahan ini, hal tersebut dikawatirkan dapat memengaruhi pemikiran masyarakat Indonesia dan terprovokasi untuk ikut mendukung tuntutan yang diinginkan oleh demonstran tersebut. Hal ini menjadi kekhawatiran pemerintah, karena pemerintah khawatir Papua lepas dari NKRI. Mereka pun memberikan himbauan kepada media untuk berhati-hati dalam memberitakan persoalan Papua ini karena berkaitan dengan permasalahan nasional dan internasional. "Kami mengimbau media, baik cetak maupun elektronik,

¹¹ Ratna Iskana, "BP Temukan Cadangan Gas di Lepas Pantai Papua", <https://katadata.co.id/berita/2019/07/10/bp-temukan-cadangan-gas-di-lepas-pantai-papua> (diakses pada 22 Mei 2020, pukul 00:47).

untuk tidak memuat informasi yang bersifat provokatif yang bisa memicu gesekan-gesekan horizontal,” Kepala Advokasi AJI Jayapura Fabio Costa menuturkan (dilansir dari regional.kompas.com¹², diakses pada 02/02/2020).

Media daring menjadi pilihan saya dalam meneliti berita unjuk rasa mahasiswa Papua di Istana Merdeka. Semenjak berkembangnya internet, perusahaan media cetak dan televisi masing-masing membuat situs daringnya. Masyarakat cenderung lebih mengonsumsi jurnalisme melalui *mobile device* karena penggunaannya yang lebih praktis. Berbagai kemudahan juga dirasakan oleh jurnalis, berita dapat diketik dilaman situs dan ketika berita sudah dipublikasikan, berita langsung mendapatkan respons dari pembaca di ruang komentar. Ditambah lagi dengan pendistribusian berita yang sangat cepat dengan adanya fitur ‘agikan’ berita di laman tersebut (Haryanto, 2014:171-173).

Terdapat beberapa media berita daring yang tercatat sebagai *top sites*¹³ alexa.com. Alexa.com merupakan situs alat analisis data yang dikembangkan oleh amazon.com. Berdiri sejak tahun 1996, situs ini telah memberikan hasil analisis data yang paling kuat dan akurat (dilansir dari alexa.com¹⁴, diakses pada 26/05/2020). Terdapat 15 media berita daring yang tercatat sebagai *top sites* teratas di Indonesia, namun hanya 12 media berita daring yang saya gunakan untuk menghitung masing-masing jumlah pemberitaan unjuk rasa mahasiswa Papua di Istana Merdeka. Sisa tiga media berita daring yang berada di urutan 12 (cnbcindonesia.com), 13 (pikiran-rakyat.com), dan 14 (uzone.id) tidak saya cantumkan, karena *pertama*, cnbcindonesia.com memiliki fokus terhadap pemberitaan ekonomi. *Kedua*, pikiran-rakyat.com memiliki basis di Bandung sedangkan unjuk rasa mahasiswa Papua ini berada di Jakarta jadi berita unjuk rasa mahasiswa Papua tersebut sulit untuk ditemukan pada pikiran-rakyat.com. *Ketiga*, uzone.id memiliki fokus terhadap pemberitaan teknologi. Berikut tabel jumlah pemberitaan unjuk rasa mahasiswa Papua di Istana merdeka dari jumlah berita terbanyak hingga tersedikit:

¹² Dhias Suwandi, “Soal Peristiwa Papua, Media Diminta Sajikan Pemberitaan yang Menyejukkan”, <https://regional.kompas.com/read/2019/08/30/19411581/soal-peristiwa-papua-media-diminta-sajikan-pemberitaan-yang-menyenangkan> (diakses pada 02 Februari 2020, pukul 15:50).

¹³ Lampiran 2. *Top Sites* di Indonesia.

¹⁴ “About Us”, <https://www.alexa.com/about> (diakses pada 26 Mei 2020, pukul 11:48).

Tabel 1. 1 Jumlah Berita Unjuk Rasa Mahasiswa Papua Pada Media-Media Daring Periode 28 Agustus – 04 September

No.	Media daring	Jumlah Berita
1.	cnnindonesia.com	25 Berita
2.	kompas.com	24 Berita
3.	tribunnews.com	18 Berita
4.	okezone.com	15 Berita
5.	tempo.co	16 Berita
6.	detik.com	10 Berita
7.	kumparan.com	10 Berita
8.	liputan6.com	9 Berita
9.	suara.com	8 Berita
10.	idntimes.com	7 Berita
11.	merdeka.com	5 Berita
12.	sindonews.com	4 Berita

Sumber: Olahan peneliti (2020)

Berdasarkan tabel tersebut ¹⁵, dapat disimpulkan bahwa cnnindonesia.com menempati urutan paling pertama berita unjuk rasa mahasiswa Papua terbanyak dan diikuti dengan kompas.com di urutan kedua. Cnnindonesia.com dan kompas.com merupakan dua media yang berbeda, cnnindonesia.com merupakan media yang berafiliasi dengan CNN (pusatnya di Atlanta, Amerika) sedangkan kompas.com merupakan media nasional.

CNN Indonesia merupakan media hasil kerjasama antara CNN (Cable News Network) dengan Trans News Corps, Indonesia pada tahun 2014. Kemudian pada 17 Agustus 2015, cnnindonesia.com dan CNN Indonesia TV melakukan *soft-launching*. Karena cnnindonesia.com berafiliasi dengan CNN Internasional, cnnindonesia.com dapat dengan mudah meminta informasi mengenai kejadian atau dokumentasi sebuah peristiwa di luar negeri, begitu juga sebaliknya. Dalam perannya sebagai media yang berafiliasi dengan media internasional, cnnindonesia.com berusaha menjadi jendela dunia untuk menatap Indonesia dan jendela bagi Indonesia untuk menatap dunia. Dalam mencapai harapannya sebagai media nasional dan internasional, jurnalis CNN Indonesia juga mendapatkan pelatihan langsung dari CNN Internasional¹⁶.

¹⁵ Lampiran 3. Rekapitulasi Berita-Berita Unjuk Rasa Mahasiswa Pada Media Daring *Top Sites*.

¹⁶ Laporan magang peneliti dan keterangan Koresponden CNN Indonesia Biro Jawa Barat, Frenky Wijaya, 2019.

Situs cnnindonesia.com sangat aktif dalam memberitakan mengenai kasus Papua. Dari 1 Januari 2019 – 4 September 2019, cnnindonesia.com telah memberitakan sekitar 675 berita pemberitaan Papua yang isinya dominan tentang konflik antara Papua dan Indonesia¹⁷. Di bulan Januari 2019, cnnindonesia.com telah sibuk memberitakan mengenai Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Organisasi Papua Merdeka (OPM), Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) serta petisi referendum untuk Papua Barat dengan jumlah sekitar 43 berita. Pada bulan Agustus 2019, cnnindonesia.com memiliki jumlah berita terbanyaknya dalam memberitakan Papua, yaitu sekitar 347 berita yang berisikan mengenai rasisme terhadap mahasiswa Papua di AMP Surabaya, kerusuhan di Papua dan unjuk rasa mahasiswa Papua di Istana Merdeka¹⁸.

Mengenai pemberitaan unjuk rasa mahasiswa Papua di Istana Merdeka, pemerintah telah memberikan peringatan kepada media untuk tidak terlalu memberitakan mengenai permasalahan tersebut. Namun, cnnindonesia.com tetap memberitakan secara terus menerus. Seperti contoh berita unjuk rasa mahasiswa Papua di Istana Merdeka yang terjadi pada Rabu, 28 Agustus 2019. Media cnnindonesia.com dapat memproduksi hingga lima berita terkait yang kontroversial tersebut. Hal tersebut disebut kontroversial karena sikap mahasiswa Papua yang melakukan unjuk rasa dengan melambaikan bendera Bintang Kejora yang bukan merupakan bendera negara Indonesia. Lalu, demonstran juga membawa tuntutan referendum di depan Istana Merdeka.

Selanjutnya, kompas.com merupakan media daring terlama yang berdiri sejak tahun 1995. Selama dua tahun berturut-turut dari tahun 2018 dan 2019, Kompas mendapatkan penghargaan Superbrands sebagai media daring terpercaya di Indonesia (dilansir dari tribunnews.com¹⁹, diakses pada 27/12/2019). Kompas pada masa cetaknya memiliki gaya bahasa yang seimbang dan hati-hati, karena Kompas memiliki kepatuhan kepada pemerintah hingga disebut sebagai “*New Order newspaper par excellence*” (Keller, 2009:45). Kompas yang dilabeli sebagai ‘media pemerintah’ sejak dahulu tersebut, menjadi subjek penelitian yang unik karena dalam pemberitaan unjuk

¹⁷ Hasil observasi peneliti.

¹⁸ Hasil observasi peneliti.

¹⁹ Content Writer, “Superbrands 2019: Kompas.com Pemenang Kategori Media Online Terpercaya”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/01/superbrands-2019-kompascom-pemenang-kategori-media-online-terpercaya?page=2> (diakses pada 27 Desember 2019, pukul 00:40).

rasa mahasiswa Papua di depan Istana Merdeka ini, Kompas memiliki jumlah berita unjuk rasa mahasiswa Papua di Istana Merdeka terbanyak kedua setelah cnnindonesia.com, yang seharusnya Kompas sebagai media ‘pemerintah’ lebih meminimalisir pemberitaan tersebut.

Pada awal tahun 2019, cnnindonesia.com sudah banyak membahas mengenai konflik Papua namun berbeda dengan kompas.com yang cenderung mempublikasikan mengenai persiapan pemilihan umum para pasangan calon presiden 2019. Hanya terdapat sekitar 25 berita mengenai Papua pada awal tahun 2019. Terhitung 939 total berita Papua kompas.com dari bulan 1 Januari 2019 – 4 September 2019 yang isinya dominan tentang konflik antara Papua dan Indonesia. Di bulan Agustus kompas.com memiliki jumlah berita Papua terbanyaknya yaitu sekitar 543 berita²⁰. Media kompas.com memiliki lebih banyak jumlah berita Papua di Bulan Agustus, dibandingkan cnnindonesia.com yang memiliki jumlah berita Papua sebanyak 347 berita. Hal ini diakibatkan topik Papua saat itu sedang menjadi pusat perhatian masyarakat. Pada tahun 2012, kompas.com pernah memiliki 11.336 jumlah komentar terbanyaknya pada satu artikel berita yang membahas mengenai Jokowi. Di sini Kompas sadar bahwa saat itu topik mengenai Jokowi mendapatkan minat tinggi dari penonton dan pembaca (Tapsell, 2017:108). Hal ini dapat dikaitkan tentang mengapa kompas.com dapat memiliki banyak jumlah berita Papua di bulan Agustus, yaitu karena tingginya minat masyarakat terhadap topik Papua.

Dilihat dari sisi ideologi, setidaknya terdapat tiga poin utama yang membedakan antara media cnnindonesia.com dan kompas.com. *Pertama*, media cnnindonesia.com yang didirikan mulai tahun 2015 merupakan media daring yang berafiliasi dengan CNN International (Atlanta, United States), sedangkan media kompas.com yang mulai didirikan sejak tahun 1995 (media daring terlama di Indonesia) merupakan media daring nasional yang memiliki gaya bahasa seimbang dan hati-hati, karena Kompas memiliki kepatuhan kepada pemerintah hingga disebut sebagai “*New Order newspaper par excellence*” (Keller, 2009:45). *Kedua*, menurut hasil observasi saya dari penelitian-penelitian terdahulu, media cnnindonesia.com lebih menonjolkan sikap mendukung Presiden Joko Widodo. Dibuktikan dengan hasil penelitian Hakim (2019:70) dengan judul “Money Politics Pemilu 2019” dan hasil penelitian Sutejo

²⁰ Hasil observasi peneliti.

(2018:609-610) dengan judul “Analisis Framing Media Online Tentang Pemberitaan Pidato Prabowo ‘Tampang Boyolali’”. Kemudian media kompas.com lebih menonjolkan sikap yang serupa yaitu mendukung Presiden Joko Widodo. Hal ini kemungkinan dipengaruhi karena adanya afiliasi antara Kompas terhadap kepentingan politik PDI Perjuangan yang merupakan partai politik pengusung Jokowi (Putera, 2014:2). *Ketiga*, dilihat dari bagaimana kedua media membahas berita sensitif, media cnnindonesia.com cenderung menonjolkan sikap keterbukaan. Dibuktikan dengan hasil penelitian Prabowo (2016:108) dengan judul “Analisis Framing Kasus LGBT Pada Media Online CNN Indonesia dan Hidayatullah.com Tahun 2016”, Prabowo menyimpulkan bahwa media cnnindonesia.com memperlihatkan sikap pro dan kontra terhadap isu tersebut. Kemudian, media kompas.com cenderung menonjolkan sikap patuh terhadap pemerintah. Dibuktikan dengan hasil penelitian Aulia (2017:99) dengan judul “Konstruksi Realitas Sosial di Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan Konflik Antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dengan Aparat Keamanan Republik Indonesia di kompas.com Edisi Oktober-November 2017). Aulia menyimpulkan bahwa kompas.com yang merupakan media pro terhadap kedaulatan NKRI, tidak akan mendukung aksi separatisme di Indonesia.

Untuk mengetahui bagaimana kedua media membingkai berita unjuk rasa mahasiswa Papua di Istana Merdeka, saya menggunakan analisis framing. Dengan menggunakan analisis framing, saya dapat melihat bagaimana sebuah media membuat berita sesuai dengan ideologi media tersebut. Realitas yang ada merupakan hasil dari konstruksi masing-masing media massa yang kemudian dijadikan berita untuk publik. Akan terlihat media apa yang mendukung pihak-pihak tertentu. Bagaimana cara mereka mengemas dan membingkai berita terhadap suatu peristiwa, terutama pada topik berita unjuk rasa mahasiswa Papua di depan Istana Merdeka ini. Pemberitaan mengenai topik ini dibahas dari berbagai sudut pandang masing-masing media. Dengan demikian, penelitian dengan menggunakan analisis framing ini ingin memperlihatkan bahwa media memiliki kepentingannya masing-masing dan berita-berita yang publik konsumsi adalah hasil dari sebuah konstruksi media massa. Media memiliki pandangannya sendiri untuk memaknai sebuah peristiwa (Eriyanto, 2002:2-3).

Analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki saya pilih karena saya ingin menganalisa teks berita unjuk rasa mahasiswa Papua di Istana Merdeka. Model

analisis framing ini memfokuskan kepada teks dan memiliki struktur analisis yang lengkap yaitu unsur sintaksis, skrip, tematik dan retorik. Unsur sintaksis berkaitan dengan bagaimana fakta mengenai suatu peristiwa disusun oleh jurnalis melalui data opini, pernyataan, kutipan dan pengamatan atas peristiwa. Kemudian, unsur skrip tentang bagaimana jurnalis menjabarkan peristiwa secara lengkap menggunakan 5W + 1H. Lalu unsur tematik yang lebih memerhatikan terhadap detail berita seperti paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antarkalimat dan yang terakhir adalah unsur retorik tentang bagaimana jurnalis memberikan justifikasi lebih mengenai beritanya seperti memberikan grafis, gambar/foto, dan metafora. (Eriyanto, 2002:294-295)

Berdasarkan asumsi saya di latar belakang ini, maka saya tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“PEMBINGKAIAN BERITA UNJUK RASA MAHASISWA PAPUA DI ISTANA MERDEKA (ANALISIS FRAMING ZHONGDANG PAN PADA MEDIA CNNINDONESIA.COM DAN KOMPAS.COM)”**

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, saya memiliki fokus penelitian tentang pembingkai yang dilakukan oleh cnnindonesia.com dan kompas.com terhadap pemberitaan unjuk rasa mahasiswa Papua di Istana Merdeka pada 28 Agustus 2019 – 4 September 2019.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, saya memiliki beberapa identifikasi masalah, yaitu:

1. Bagaimana cnnindonesia.com dan kompas.com membingkai berita mengenai unjuk rasa mahasiswa papua dari unsur sintaksis?
2. Bagaimana cnnindonesia.com dan kompas.com membingkai berita mengenai unjuk rasa mahasiswa papua dari unsur skrip?
3. Bagaimana cnnindonesia.com dan kompas.com membingkai berita mengenai unjuk rasa mahasiswa papua dari unsur tematik?
4. Bagaimana cnnindonesia.com dan kompas.com membingkai berita mengenai unjuk rasa mahasiswa papua dari unsur retorik?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, saya memiliki beberapa tujuan penelitian, yaitu:

1. Mengetahui bagaimana *cnnindonesia.com* dan *kompas.com* membingkai berita mengenai unjuk rasa mahasiswa papua dari unsur sintaksis.
2. Mengetahui bagaimana *cnnindonesia.com* dan *kompas.com* membingkai berita mengenai unjuk rasa mahasiswa papua dari unsur skrip.
3. Mengetahui bagaimana *cnnindonesia.com* dan *kompas.com* membingkai berita mengenai unjuk rasa mahasiswa papua dari unsur tematik.
4. Mengetahui bagaimana *cnnindonesia.com* dan *kompas.com* membingkai berita mengenai unjuk rasa mahasiswa papua dari unsur retorisi.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai kajian *framing*, khususnya dengan menggunakan model *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dalam bidang komunikasi.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan informasi dan masukan bagi pihak *cnnindonesia.com* dan *kompas.com*. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui lebih tentang penelitian dengan model *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

1.6 Tahapan Penelitian

Saya memiliki tahapan dalam meneliti gagasan ini. *Pertama*, saya mengidentifikasi permasalahan mengenai unjuk rasa mahasiswa Papua di Istana Merdeka. *Kedua*, saya mengumpulkan data-data berita mengenai permasalahan tersebut dari media *cnnindonesia.com* dan *kompas.com* pada tanggal 28 Agustus 2019 hingga 4 September 2019. *Ketiga*, saya mengidentifikasi berita-berita tersebut. *Keempat*, saya menganalisa data berita tersebut menggunakan analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dari unsur sintaksis, skrip, tematik dan retorisi. Pada akhirnya, akan terlihat hasilnya bagaimana media *cnnindonesia.com* dan *kompas.com* membingkai berita mengenai tersebut.